

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN

Fatmawati H.A. Zakariah¹, Uun Hasunah², Agus Tinus³

¹Universitas Muhammadiyah Malang, Email : zakariahfatmawati2024@gmail.com*

²Universitas Muhammadiyah Malang, Email : uunhasunah1987@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Malang, Email : agt.tns.umm@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Article History

Received: 12-04-2026

Revision: 12-04-2026

Acceptance: 21-04-2026

Published: 30-04-2026

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan serta pengembangan sistem pendidikan di Indonesia dengan menitikberatkan pada empat pilar utama, yaitu perencanaan strategis, analisis kebutuhan pendidikan, perencanaan mutu dan relevansi, serta efisiensi dan pemerataan pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi pustaka sistematis terhadap berbagai sumber literatur ilmiah dan dokumen kebijakan pendidikan pada periode 2021–2025. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis konten dengan pendekatan tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik perencanaan strategis pendidikan telah mengalami pergeseran ke arah pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis data, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Analisis kebutuhan pendidikan menjadi landasan penting dalam merancang program yang tepat sasaran, terutama dalam mengatasi kesenjangan literasi, numerasi, serta distribusi tenaga pendidik. Selain itu, perencanaan mutu dan relevansi pendidikan diarahkan pada penguatan kompetensi abad ke-21 serta penyesuaian dengan kebutuhan dunia kerja melalui kebijakan kurikulum yang fleksibel. Di sisi lain, aspek efisiensi dan pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan, khususnya terkait distribusi sumber daya dan akses pendidikan di wilayah tertinggal. Oleh karena itu, integrasi keempat pilar tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: : Analisis Kebutuhan, Mutu Pendidikan, Perencanaan Strategis Pendidikan, Pemerataan Pendidikan, Perencanaan Berbasis Data

Abstract : This study aims to examine the planning and development of Indonesia's education system by focusing on four key pillars: strategic planning, educational needs assessment, quality and relevance planning, as well as efficiency and equity in education. A qualitative approach was employed using a systematic literature review design, drawing on academic publications and policy documents published between 2021 and 2025. Data analysis was conducted through

thematic content analysis. The findings indicate that educational strategic planning has shifted toward more participatory and data-oriented practices, although limitations in human resource capacity remain a challenge. Educational needs assessment serves as a crucial foundation for designing targeted programs, particularly in addressing disparities in literacy, numeracy, and teacher distribution. Furthermore, quality and relevance planning emphasize the development of 21st-century competencies and alignment with labor market demands through adaptive curriculum policies. Meanwhile, issues of efficiency and equity continue to pose challenges, especially in terms of resource allocation and access to education in disadvantaged regions. Therefore, the integration of these four pillars is essential to achieving a high-quality, inclusive, and sustainable education system.

Keywords: *Education Quality, Education Equity, Data Driven Planning, Needs Assessment, Strategic Educational Planning*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan institusi kunci dalam masyarakat modern yang memiliki peran sentral dalam reproduksi sekaligus tantangan terhadap ketimpangan sosial (Eacott, 2023). Dalam konteks Indonesia, sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan kompleks terkait kualitas, relevansi, efisiensi, dan pemerataan akses pendidikan di tengah dinamika perubahan global dan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan menjadi instrumen strategis untuk menjawab tantangan tersebut.

Perencanaan pendidikan merupakan elemen fundamental dalam pembangunan sistem pendidikan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan. Tanpa adanya perencanaan yang komprehensif, berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan berpotensi bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Menurut Banurea et al. (2023) perencanaan pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang rasional dan sistematis dalam merumuskan tujuan, menyusun strategi, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan pendidikan yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut antara lain tercermin dari rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil PISA 2022 yang menempatkan

Indonesia pada peringkat ke-72 dari 79 negara peserta. Selain itu, kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah masih relatif tinggi, serta terdapat tuntutan yang semakin besar agar sistem pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan dinamika dan kebutuhan dunia kerja. Dalam konteks tersebut, perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan menjadi semakin penting sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran terhadap penurunan hasil belajar, khususnya di kalangan peserta didik berprestasi tinggi, telah meningkatkan kebutuhan akan kebijakan pendidikan yang mempromosikan keunggulan sekaligus kesetaraan (Sharma et al., 2022). Data *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022* menunjukkan tidak hanya penurunan skor rata-rata tetapi juga penyusutan proporsi peserta didik berprestasi tinggi, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap inovasi, mobilitas sosial, dan daya saing nasional di masa depan. Transformasi perencanaan pendidikan di Indonesia telah dimulai dengan pergeseran dari model tersentralisasi menuju desentralisasi dan pendekatan partisipatif (Khunaifi & Sumarsono, 2024). Namun, kesenjangan antara ketersediaan data evaluasi dan implementasi program peningkatan mutu masih menjadi masalah krusial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perencanaan pendidikan yang berlangsung selama ini masih lebih

menitikberatkan pada aspek administratif, seperti pemenuhan kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap aturan, daripada pada penguatan kualitas pedagogis yang berdampak langsung terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik, terutama dalam kemampuan literasi. Dampaknya, perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mendorong pembelajaran yang bermakna, penerapan diferensiasi, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang sangat dibutuhkan di abad ke-21.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengarahkan kembali perencanaan pendidikan agar lebih berorientasi pada peningkatan mutu proses pembelajaran yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap capaian literasi dan kompetensi peserta didik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi perencanaan strategis dalam pendidikan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas dan daya saing satuan pendidikan?, (2) Bagaimana proses analisis kebutuhan pendidikan dilakukan secara komprehensif dalam merespons dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakteristik peserta didik?, (3) Bagaimana perencanaan mutu dan relevansi pendidikan dirancang dan diimplementasikan agar selaras dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, serta tuntutan abad ke-

21?, (4) Bagaimana upaya peningkatan efisiensi dan pemerataan pendidikan dilaksanakan dalam rangka mengurangi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan melalui empat perspektif utama: (1) perencanaan strategis dalam pendidikan, (2) analisis kebutuhan pendidikan, (3) perencanaan mutu dan relevansi pendidikan, serta (4) efisiensi dan pemerataan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka sistematis (Systematic Literature Review). Desain ini dilakukan untuk memetakan *state of art* perencanaan pendidikan di Indonesia pasca pandemi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam perkembangan, tantangan, dan peluang dalam perencanaan pendidikan melalui sintesis berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan yang relevan (Creswell & Poth, 2018).

Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur sistematis dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah terakreditasi, laporan kebijakan, dokumen resmi pemerintah, dan prosiding konferensi periode 2021-2025.

Analisis Data: Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten (content analysis)

dengan pendekatan tematik. Miles et al. (2014) menyatakan bahwa analisis data kualitatif melibatkan tiga alur kegiatan simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data dianalisis berdasarkan empat tema utama yang telah ditentukan: (1) perencanaan strategis, (2) analisis kebutuhan, (3) mutu dan relevansi, serta (4) efisiensi dan pemerataan.

Validitas Data: Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber literatur dan dokumen kebijakan, serta member checking melalui diskusi dengan pakar perencanaan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Strategis dalam Pendidikan

Perencanaan strategis dalam bidang pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan menetapkan arah pengembangan jangka panjang suatu lembaga atau sistem pendidikan melalui analisis lingkungan, perumusan visi dan misi, penentuan tujuan strategis, serta penyusunan program kerja yang terukur dan terarah. Menurut Khamima et al. (2025), penerapan manajemen strategis pendidikan yang efektif memungkinkan organisasi pendidikan untuk beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan lingkungan, sekaligus menjaga keselarasan antara potensi sumber daya internal dengan berbagai tuntutan dan dinamika eksternal.

Perencanaan strategis berperan sebagai pedoman atau peta jalan yang mengarahkan proses pengambilan keputusan, menentukan prioritas dalam alokasi sumber daya, serta memastikan akuntabilitas pelaksanaan berbagai program pendidikan. Rachmad (2023) menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang memiliki rencana strategis yang jelas cenderung lebih mampu menghadapi dinamika perubahan secara terencana dan sistematis, sehingga tidak bersifat reaktif terhadap berbagai tantangan yang muncul.

Dalam perspektif efisiensi pemanfaatan sumber daya, keberadaan perencanaan strategis menjadi sangat penting, khususnya ketika anggaran pendidikan berada dalam kondisi terbatas di berbagai satuan pendidikan. Perencanaan yang tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil serta tanpa didukung analisis yang komprehensif berpotensi tidak hanya menghambat upaya peningkatan mutu, tetapi juga menimbulkan pemborosan anggaran, baik pada level nasional maupun sekolah (Hisyam, 2025; Rahmatullisa et al., 2026). Kesalahan dalam menetapkan program, aktivitas, dan distribusi pembiayaan dapat menyebabkan sumber daya yang terbatas tidak mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kualitas pembelajaran maupun capaian hasil belajar peserta didik.

Sebaliknya, ketiadaan perencanaan strategis yang memadai dapat menyebabkan pengelolaan pendidikan menjadi tidak konsisten

serta berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

Pada tingkat nasional, perencanaan strategis di bidang pendidikan diwujudkan melalui sejumlah dokumen kebijakan utama. Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Bappenas, 2022), yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia unggul sebagai salah satu dari tujuh agenda prioritas pembangunan nasional. Kedua, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Renstra Kemendikdasmen) 2025-2029 (Permendikdasmen No. 19 Tahun 2025) yang menetapkan visi terwujudnya pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat, dengan empat strategi utama, yaitu peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kapasitas dan profesionalitas guru, serta percepatan transformasi digital dalam pendidikan. Ketiga, Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 yang diluncurkan oleh Bappenas pada Oktober 2024 sebagai pedoman pengembangan pendidikan jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ketiga dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan membentuk suatu sistem perencanaan yang terstruktur, dan berkesinambungan. RPJMN 2020-2024 berperan sebagai landasan kebijakan jangka menengah yang menentukan arah prioritas pembangunan nasional, termasuk fokus pada pengembangan sumber

daya manusia yang unggul. Selanjutnya, Renstra Kemendikdasmen 2025-2029 dapat diposisikan sebagai perangkat operasional yang menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam bentuk strategi, program, serta indikator kinerja yang lebih aplikatif di bidang pendidikan. Adapun Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045 berfungsi sebagai kerangka visi jangka panjang yang mengarahkan transformasi pendidikan secara berkelanjutan hingga tahun 2045.

Dengan demikian, Renstra 2025-2029 tidak dapat dipandang sebagai dokumen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai penghubung strategis antara sasaran jangka menengah dan visi jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan 2045. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang tidak bersifat terpisah-pisah, melainkan terintegrasi, selaras, dan secara langsung mendukung pencapaian tujuan utama pembangunan pendidikan nasional, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di tingkat global.

Pada tingkat satuan pendidikan, perencanaan strategis diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan serta Anggaran Sekolah (RKAS). Menurut Sudari et al. (2025), penyusunan RKS dan RKAS yang dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada analisis kondisi sekolah secara komprehensif merupakan landasan

penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di tingkat satuan pendidikan.

Salah satu inovasi penting dalam perencanaan pendidikan di Indonesia setelah tahun 2022 adalah penerapan mekanisme Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan. Melalui pendekatan Identifikasi Refleksi Benahi (IRB), satuan pendidikan didorong untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan berdasarkan data yang tersedia, melakukan refleksi terhadap faktor-faktor penyebabnya, serta merancang langkah perbaikan yang lebih spesifik dan terukur. Hidayah et al. (2025) menunjukkan bahwa sekolah yang secara konsisten menerapkan model PBD cenderung mengalami peningkatan mutu yang lebih signifikan dibandingkan dengan sekolah yang masih mengandalkan perencanaan yang didasarkan pada asumsi maupun rutinitas administratif semata.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyati & Haryati (2024) menunjukkan bahwa meskipun Perencanaan Berbasis Data (PBD) memberikan peluang yang signifikan bagi satuan pendidikan untuk menyusun program berdasarkan data yang faktual, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utama terletak pada keterbatasan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam menafsirkan data yang terdapat dalam Rapor Pendidikan

secara tepat. Selain itu, proses implementasi PBD juga memerlukan dukungan berupa pendampingan yang berkelanjutan dari dinas pendidikan agar pemanfaatan data tersebut dapat dilakukan secara optimal dalam proses perencanaan pendidikan.

Salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan dalam perencanaan strategis pada tingkat satuan pendidikan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Penelitian yang dilakukan oleh Alim dalam Mutu et al. (2024) pada jenjang sekolah dasar menunjukkan bahwa penerapan analisis SWOT dalam proses perencanaan strategis dapat membantu sekolah mengidentifikasi berbagai aspek penting, seperti kekuatan yang dimiliki, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang perlu diantisipasi dalam pengembangan lembaga pendidikan.

Melalui pendekatan tersebut, satuan pendidikan dapat menyusun perencanaan yang lebih terarah dan berbasis pada kondisi nyata yang dihadapi. Dengan demikian, proses perencanaan yang dihasilkan menjadi lebih realistis, kontekstual, serta mampu merespons kebutuhan dan karakteristik spesifik masing-masing sekolah secara lebih adaptif.

Analisis Kebutuhan Pendidikan

Analisis kebutuhan pendidikan (educational needs assessment) merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi pendidikan yang sedang berlangsung (what is) dengan kondisi

yang diharapkan (what should be). Melalui proses ini, berbagai permasalahan dan kebutuhan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dipetakan secara lebih terstruktur dan objektif.

Hasil analisis kebutuhan tersebut menjadi landasan ilmiah dalam merumuskan program-program pendidikan yang relevan, efisien, dan tepat sasaran. Mayasari (2023) menegaskan bahwa tanpa didukung oleh analisis kebutuhan yang memadai, perencanaan program pendidikan berisiko menghasilkan kebijakan atau program yang tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan nyata peserta didik maupun masyarakat

Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 sumber Bappenas (2024) mengidentifikasi sejumlah kebutuhan pendidikan yang bersifat sistemik dan mendesak untuk segera ditangani. Pertama, perlunya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang pada tahun 2023 baru mencapai 36,36 persen, sehingga masih cukup jauh dari target nasional sebesar 60 persen. Kedua, adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan menengah. Ketiga, perlunya peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik yang secara rata-rata masih berada di bawah standar yang diharapkan, sebagaimana tercermin dari hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) tahun 2024 yang menunjukkan

skor literasi membaca pada jenjang sekolah dasar sebesar 60,03 dan numerasi sebesar 53,36 (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025).

Selain itu, terdapat kebutuhan yang mendesak terkait pemerataan distribusi guru yang hingga saat ini masih menunjukkan ketimpangan antar wilayah. Renstra Kemendikdasmen 2025-2029 menyebutkan bahwa ketidak sinkronan antara kebijakan perencanaan dan pengangkatan guru yang ditetapkan di tingkat pusat dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan guru pada jenjang SMA/SMK menimbulkan kendala dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah daerah. Kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya upaya pemerataan ketersediaan guru secara optimal di berbagai wilayah.

Pada tingkat satuan pendidikan, analisis kebutuhan umumnya dilaksanakan melalui mekanisme Evaluasi Diri Sekolah (EDS) serta pemanfaatan data yang tersedia dalam Rapor Pendidikan. Melalui kedua instrumen tersebut, sekolah dapat melakukan pemetaan kondisi internal secara lebih sistematis berdasarkan berbagai indikator kinerja pendidikan yang terukur.

Data yang disajikan dalam Rapor Pendidikan secara otomatis menunjukkan berbagai indikator yang memerlukan perhatian prioritas di masing-masing sekolah, seperti capaian kompetensi literasi dan numerasi peserta didik, iklim keamanan lingkungan sekolah,

kesejahteraan psikologis guru dan siswa, hingga kualitas tata kelola sekolah. Dengan adanya data tersebut, satuan pendidikan memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kebutuhan spesifik yang dimiliki, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun program perbaikan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran.

Dari perspektif relevansi, analisis kebutuhan pendidikan juga perlu mempertimbangkan kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan tuntutan dunia kerja serta kebutuhan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian (mismatch) antara keterampilan yang diperoleh melalui proses pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor industri masih menjadi permasalahan struktural dalam sistem pendidikan. UNESCO (2021) menegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari capaian akademik semata, tetapi juga mencakup aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam kerangka tersebut, keselarasan antara hasil pendidikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas suatu sistem pendidikan.

Sebagai upaya untuk merespons permasalahan tersebut, pemerintah mendorong penguatan konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah program SMK Pusat

Keunggulan (SMK PK) yang dirancang untuk mengintegrasikan standar kompetensi industri ke dalam kurikulum serta sistem penilaian di sekolah menengah kejuruan, sehingga kompetensi lulusan lebih selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Pada jenjang pendidikan tinggi, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga dikembangkan sebagai langkah untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung melalui berbagai aktivitas di dunia industri maupun di masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperkuat kompetensi praktis sekaligus meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi dinamika dunia kerja.

Perencanaan Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Perencanaan mutu dan relevansi pendidikan menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas. Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik semata, tetapi juga kesesuaiannya dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan masyarakat luas. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh capaian akademik atau tingkat kelulusan semata, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan dalam membentuk individu yang berkarakter, produktif, serta memiliki kreativitas dan daya inovasi. Dengan demikian, kualitas pendidikan mencerminkan sejauh mana proses pendidikan mampu mengembangkan potensi peserta didik

secara holistik. Perencanaan mutu pendidikan meliputi berbagai aspek penting, antara lain perumusan standar pendidikan, penetapan indikator pencapaian yang jelas, perancangan proses pembelajaran yang berkualitas, serta penguatan kapasitas dan profesionalitas guru sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara operasional, perencanaan mutu pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup siklus kegiatan berupa penetapan standar mutu, pelaksanaan standar yang telah ditetapkan, evaluasi terhadap tingkat pemenuhan standar, penetapan standar baru, serta upaya penyempurnaan secara berkelanjutan. (Hasanah et al., 2022) menemukan bahwa lembaga pendidikan yang secara konsisten menerapkan strategi perencanaan mutu yang ditandai dengan adanya komitmen pimpinan, keterlibatan aktif seluruh warga sekolah, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan cenderung menunjukkan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih berkelanjutan.

Pada tingkat sistem pendidikan, perencanaan mutu direalisasikan melalui kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Delapan standar nasional pendidikan, yang meliputi standar kompetensi lulusan hingga standar pembiayaan, berfungsi sebagai kerangka acuan bagi seluruh satuan pendidikan dalam

merancang serta melaksanakan berbagai program peningkatan mutu pendidikan secara sistematis dan terarah.

Relevansi pendidikan berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara isi, proses, dan hasil pendidikan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta tuntutan dunia kerja. Dalam konteks tersebut, sistem pendidikan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang selaras dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan nasional perlu diarahkan untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan relevansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan. Upaya tersebut menjadi penting agar sistem pendidikan mampu merespons berbagai tantangan yang muncul seiring dengan perubahan kehidupan pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Kurikulum Merdeka menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan pada era saat ini. Melalui kebijakan ini, sekolah diberikan fleksibilitas yang lebih luas untuk mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta konteks sosial dan budaya setempat. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menjawab berbagai kritik terhadap kurikulum sebelumnya yang dinilai terlalu seragam dan kurang mencerminkan realitas kehidupan peserta didik.

Dalam implementasinya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) berfungsi sebagai mekanisme konkret untuk mengintegrasikan berbagai kompetensi yang relevan dengan kehidupan nyata ke dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter.

Pada jenjang SMK dan pendidikan tinggi, aspek relevansi pendidikan direncanakan secara lebih terarah melalui penerapan mekanisme link and match dengan dunia industri. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kompetensi yang dikembangkan dalam proses pendidikan selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Hasil kajian yang dilakukan di Kota Tanjungpinang (2025) menunjukkan bahwa peralihan dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat otonomi sekolah sekaligus meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat pada era Society 5.0.

Efisiensi dan Pemerataan Pendidikan

Efisiensi pendidikan berkaitan dengan kemampuan sistem pendidikan dalam mengoptimalkan proses transformasi masukan (input) menjadi keluaran (output) dengan pemanfaatan sumber daya yang seefektif mungkin. Dalam konteks ini, efisiensi menunjukkan sejauh mana sumber daya yang tersedia dapat dikelola secara optimal untuk

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Beberapa indikator yang mencerminkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain tingginya angka putus sekolah, peserta didik yang harus mengulang kelas, keterlambatan dalam menyelesaikan studi, serta pemborosan sumber daya yang disebabkan oleh distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, program pendidikan yang efisien adalah program yang mampu menciptakan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya pendidikan, sehingga proses pencapaian tujuan pendidikan dapat berlangsung secara efektif tanpa mengalami hambatan yang signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp660,8 triliun atau sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencerminkan komitmen besar pemerintah terhadap sektor pendidikan. Meskipun demikian, besarnya alokasi anggaran tersebut tidak secara otomatis menjamin tercapainya efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, karena tantangan utama terletak pada pemanfaatan anggaran yang optimal, transparan, dan akuntabel. Permasalahan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan antara lain berkaitan dengan ketimpangan distribusi dana antarwilayah, adanya tumpang tindih program di antara berbagai kementerian atau lembaga, serta belum optimalnya sistem monitoring

dan evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah mendorong penerapan model perencanaan berbasis data yang bertujuan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran diarahkan untuk menangani permasalahan pendidikan yang paling mendesak berdasarkan data yang tercantum dalam Rapor Pendidikan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penggunaan anggaran serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis bukti. Selain itu, integrasi indikator Rapor Pendidikan ke dalam mekanisme Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sebagaimana diatur dalam Kepmendikbudristek No. 195/M/2023 juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran secara lebih prioritas serta sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pendidikan diharapkan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Perencanaan Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan merupakan aspek keadilan dalam sistem pendidikan yang bertujuan

menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang sosial ekonomi, kondisi geografis, maupun keterbatasan fisik. Prinsip ini menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan yang signifikan. Keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, infrastruktur teknologi informasi, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas masih menjadi hambatan di berbagai daerah, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih sistematis untuk mengurangi disparitas pendidikan antarwilayah.

Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 (Bappenas, 2024) secara jelas menempatkan pemerataan pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Dokumen tersebut mengakui bahwa meskipun angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir, sistem pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan ketimpangan akses dan rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Selain itu, kondisi sosial ekonomi keluarga juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi

pendidikan anak, sehingga sebagian anak yang berasal dari daerah tertinggal masih menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk mengalami putus sekolah.

Berbagai upaya pemerataan pendidikan telah dan terus diupayakan oleh pemerintah melalui sejumlah kebijakan dan program strategis. Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi perluasan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), pelaksanaan program penempatan guru melalui skema SM-3T dan pengangkatan guru PPPK guna memperkuat distribusi tenaga pendidik di daerah terpencil, pengembangan program digitalisasi sekolah untuk memperluas akses pembelajaran, serta penerapan kebijakan afirmasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan daerah tertinggal.

Kajian yang dilakukan oleh Khumaidi et al. (2024) mengenai evaluasi kebijakan desentralisasi pendidikan menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan di daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan politik serta alokasi anggaran yang memadai dari kepala daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan pemerataan pendidikan perlu dilaksanakan secara terpadu pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,

hingga tingkat satuan pendidikan, dengan didukung oleh mekanisme koordinasi yang kuat serta sistem akuntabilitas yang jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan yang efektif memerlukan integrasi empat pilar utama secara simultan. Pertama, perencanaan strategis harus bergeser dari pendekatan intuitif dan tersentralisasi menuju pendekatan berbasis data, partisipatif, dan desentralistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, analisis kebutuhan pendidikan yang akurat, mencakup proyeksi peserta didik, kebutuhan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan kompetensi pedagogis, merupakan fondasi bagi perencanaan yang tepat sasaran. Ketiga, perencanaan mutu dan relevansi pendidikan harus berorientasi pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan abad 21, termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi, literasi digital, dan karakter unggul, serta selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Keempat, efisiensi dan pemerataan pendidikan memerlukan keseimbangan yang cermat antara optimalisasi sumber daya dan keadilan distribusinya, dengan perhatian khusus pada daerah tertinggal dan kelompok rentan.

Keempat pilar tersebut tidak dipandang sebagai komponen yang terpisah, melainkan sebagai sebuah sinergi interdependen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kelemahan pada salah

satu pilar, misalnya ketidakakuratan dalam analisis kebutuhan, dapat berdampak pada menurunnya efektivitas perencanaan strategis, melemahkan mutu dan relevansi pendidikan, hingga pada akhirnya menghambat upaya efisiensi serta pemerataan. Sebaliknya, apabila satu pilar diperkuat, maka pilar lainnya juga akan ikut terdorong, sehingga tercipta sistem perencanaan pendidikan yang terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan.

Sebagai implikasi untuk penelitian berikutnya (future research), mengingat kajian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), perlu dilakukan penelitian empiris dengan metode kuantitatif guna menguji efektivitas model IRB secara lebih objektif. Penelitian tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan kausal antar pilar serta mengukur sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan mutu dan pemerataan hasil belajar peserta didik.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: (1) Penguatan sistem perencanaan berbasis data melalui implementasi siklus IRB (Identifikasi-Refleksi-Benahi) yang terintegrasi dengan Rapor Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah dan sekolah dalam melakukan analisis kebutuhan, interpretasi data, dan perencanaan strategis partisipatif. (3) Implementasi model systemic design yang

mengintegrasikan prinsip keadilan (equity) dan keunggulan (excellence) dalam setiap aspek perencanaan pendidikan. (4) Penguatan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dengan indikator yang jelas dan terukur untuk memastikan implementasi rencana berjalan sesuai target. (5) Peningkatan investasi pada pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta pengembangan infrastruktur digital untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Banurea, R. D. U., Simanjuntak, R. E., & Siagian, R. (2023). Perencanaan pendidikan. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 88–99. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Bappenas. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020--2024*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id>
- Bappenas. (2024). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025--2045*. Kementerian PPN/Bappenas. <https://www.bappenas.go.id>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Eacott, S. (2023). Schooling for equitable excellence: Principles of systemic design. *Journal of Educational Administration*, 61(3), 304–321.
- Hasanah, M., Sandy, P., Mannan, M., & Nasucha, J. A. (2022). Analisis strategi perencanaan mutu satuan pendidikan di lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

- Attadrib*, 5(2), 108–119.
- Hidayah, E., Sofiyanti, E., Inayah, I., & Muniati, N. A. N. (2025). Perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan mutu sekolah. *LEARNING*, 5(1), 16–23.
- Hisyam. (2025). Efisiensi anggaran pendidikan melalui perencanaan dan pengawasan yang efektif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 45–56.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Renstra 2025--2029*.
- Khamima, B. A., Imaddudin, A., & Mardiyah, M. (2025). Manajemen strategis pendidikan dalam menyusun rencana dan kebijakan yang efektif. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 5216–5231.
- Khumaidi, A., Hamdani, U. L., & Baharuddin. (2024). Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. *Idarah Tarbawiyah*, 5(4), 468–481.
- Khunaifi, M. A., & Sumarsono, R. B. (2024). Transformation of education planning in Indonesia: A qualitative review of documentation and policy. *Proceedings Series of Educational Studies*, 1–12.
- Mayasari, N. (2023). *Pengembangan perencanaan program pendidikan*. IKAPI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mutu, M., Dasar, P., & Menengah, D. A. N. (2024). 4 1,2,3. 09.
- Nurchayati, E., & Haryati, T. (2024). Peluang dan tantangan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 6(2).
- Rachmad, F. (2023). *Kesadaran Manfaat Perencanaan Strategis Bagi Lembaga Pendidikan*. 1(2), 102–110.
- Rahmatullisa, S., Nurhayati, E., & Firmansyah, D. (2026). Optimalisasi perencanaan berbasis data dalam meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(2), 123–135.
- Sharma, U., Aiello, P., & Pace, E. (2022). Teachers' Preparedness and Professional Development Needs for Inclusive Education. *European Journal of Special Needs Education*, 37(2), 184–200.
- Sudari, Nurhayati, S., Sritini, Setiorini, T. A., & Murniati, N. A. N. (2025). Strategi penyusunan dan implementasi RKS dan RKAS untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1).
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*.